

PROBLEMATIKA GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO) DI SMK PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA KATEGORI MANDIRI BERUBAH

Joko Sriyanto^{1*}, Agus Budiman², Wardan Suyanto³, Bambang Sulisty⁴, Priti Priti⁵, Satria Pangestu⁶, Olga Satria Tri Utama⁷, Laksono Tejo Pawoko⁸, Feri Dian Pratama⁹
¹⁻⁹ Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta
*Corresponding Author: joko_sriyanto@uny.ac.id

Abstract

This research aimed to explore the challenges encountered by teachers of Automotive Light Vehicle Engineering (TKRO) in one of the State Vocational High Schools in the Special Region of Yogyakarta in implementing the Independent Curriculum category of the Merdeka Curriculum. Data collection involved interviews and qualitative descriptive data analysis techniques. The study involved 4 respondents, including the Curriculum Vice Principal, TKRO Head of Department, and 2 TKRO teachers teaching Vocational Subjects in Grade 10. The findings of the research suggest that TKRO teachers face several problems, such as: 1) lack of support from Kemendikbudristek and Yogyakarta Special Region Education Office; 2) lack of understanding of the concepts and philosophy of the Merdeka Curriculum; and 3) difficulties in implementing Differentiated Learning.

Key Words: *challenges, teachers, TKRO, Merdeka Curriculum*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) di salah satu SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Kategori Mandiri Berubah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Responden berjumlah 4 orang yang terdiri dari Waka Kurikulum, Kaproli TKRO, dan 2 Guru TKRO yang mengampu Mata Pelajaran Kejuruan di Kelas 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru TKRO menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: 1) Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY, 2) Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka, dan 3) Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi.

Kata kunci: Problematika, Guru, TKRO, Kurikulum Merdeka

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) di Indonesia (Spink, Cloney, & Berry, 2022). Ketertinggalan pembelajaran terindikasi melalui: peserta didik kesulitan untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, atau ketika peserta didik mempunyai kompleksitas permasalahan karena tidak mampu menguasai pembelajaran di setiap jenjang (Kemendikbudristek, 2022).

Sebagai upaya pemulihan terhadap *learning loss*, UNESCO (2020) memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk fokus mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang paling penting dan harus dikuasai pada jenjang tertentu. Senada dengan rekomendasi UNESCO

tersebut, Molato-Gayares et.al. (2022) menyatakan bahwa sebagai upaya pemulihan pembelajaran perlu dilakukan prioritas dan penyederhanaan kurikulum untuk memastikan bahwa kompetensi dasar yang penting dapat dikuasai oleh peserta didik.

Berkaitan dengan kurikulum, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek pada tahun 2020 memberikan dua opsi pilihan kepada sekolah, menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) atau menggunakan Kurikulum Darurat (K-13 yang disederhanakan) sebagai langkah mengatasi *learning loss*. Pemberlakuan Kurikulum Darurat bertujuan supaya pembelajaran selama pandemi fokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Hasil evaluasi Kemendikbudristek terhadap pelaksanaan kurikulum darurat menunjukkan bahwa secara umum, siswa dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hasil asesmennya yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna Kurikulum 2013 secara penuh. Selain itu, implementasi kurikulum darurat juga mampu mengurangi indikasi *learning-loss* selama pandemi secara signifikan (Kemendikbudristek, 2022). Fakta ini menunjukkan pentingnya perubahan dan implementasi kurikulum yang lebih sederhana dan fleksibel.

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperkenalkan Kurikulum Prototipe (kemudian berubah namanya menjadi Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai pilihan tambahan bagi sekolah untuk melaksanakan pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Sitoningrum, 2023).

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Ada pun karakteristik dari Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut: (1) Pengembangan *soft skills* dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila; (2) Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar; dan (3) Pembelajaran yang fleksibel, dimana guru diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal (<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/#alur>)

Pada tahap awal, Kurikulum Merdeka diterapkan pada 2.499 Sekolah Penggerak (SP) dan 901 SMK Program Keunggulan (SMKPK). Pada tahun 2023, data Kemendikbudristek menunjukkan terdapat 293.373 sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Berdasarkan Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023, terdapat tiga kategori sekolah pelaksana

IKM, yaitu: 1) Mandiri Belajar, satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen; 2) Mandiri Berubah, satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen; dan 3) Mandiri Berbagi, satuan Pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.

Dalam rangka mendukung implementasinya, Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2022 telah melaksanakan pelatihan kepada sejumlah 19.086 kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah terkait kurikulum merdeka. Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa guru-guru di SP maupun SMKPK belum sepenuhnya memahami tentang kurikulum merdeka. Terdapat kebingungan dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk kemudian menggunakannya pada pengorganisasian pembelajaran. Selain itu, juga terjadi kebingungan dalam memanfaatkan hasil asesmen untuk acuan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi, serta kebingungan terkait posisi projek-projek P5 dalam struktur kurikulum (Kemendikbudristek, 2022).

Guru, sebagai ujung tombak dalam implelementasi Kurikulum Merdeka mengalami kesulitan dalam menganalisis CP, merumuskan TP, menyusun ATP, menyusun Modul Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, serta menentukan bentuk asesmen dan bentuk asesmen pada pembelajaran berbasis proyek (Zulaiha, Meisin, dan Meldina, 2022; Windayanti, et.al., 2023; Putri, et.al., 2023; Tanggur, 2023). Hal ini dikarenakan guru belum memahami paradigma dasar dari Kurikulum Merdeka (Yuhastina, et.al., 2020; Arifiani & Umami, 2023).

Sejalan dengan hasil-hasil penelitian di atas, Warsihna, et.al. (2023) yang meneliti kesiapan sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Dasar menemukan bahwa dari 6 sekolah, hanya 2 sekolah yang skornya di atas rata-rata, sementara 4 sekolah lainnya di bawah rata-rata.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang terdampak paling berat selama pandemi Covid-19 dan penutupan sekolah serta pembelajaran online. Hal ini dikarenakan sebagian besar pembelajaran di SMK dilaksanakan secara praktik yang sangat sulit dilaksanakan secara online (ILO, 2021; Hoftijzer, Levin, & Weber, 2020). Selain itu

praktik industri/magang sebagai salah satu bagian penting dalam membekali pengetahuan, sikap, dan kompetensi kerja siswa juga tidak dapat dilaksanakan.

Hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sekolah dan guru masih menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan kurikulum merdeka. Sekolah dan guru masih membutuhkan waktu dan dukungan untuk memahami dan melaksanakan hal-hal yang lebih detail supaya kurikulum dapat diimplementasikan secara utuh (Kemendikbudristek, 2022). Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan pada jenjang SD, SMP, dan SMA, namun belum banyak yang meneliti pada jenjang SMK lebih khusus lagi SMK bidang Otomotif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi gap tersebut. Hasil dari penelitian ini akan menjadi dasar untuk untuk perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum merdeka secara umum dan bidang Otomotif secara khusus.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di SMK Negeri X (pseudonim) Provinsi DIY yang merupakan SMK pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka kategori Mandiri Berubah mulai Tahun Ajaran 2022/2023. Subyek/informan penelitian adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum (Waka Kurikulum), Ketua Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Kaproli TKRO) dan 2 guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan TKRO di kelas 10 (Kurikulum Merdeka di SMK ini baru dilaksanakan di kelas 10). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis Miles & Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian diuraikan dan dibahas menjadi sub-bagian berdasarkan pada tema-tema yang muncul dari wawancara dengan semua responden. Tema utama permasalahan yang dihadapi oleh guru TKRO dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi kurangnya dukungan dari dinas pendidikan; kurangnya pemahaman terhadap konsep kurikulum merdeka; serta kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi.

1. Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi

Dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek mau pun Dinas Pendidikan Kabupaten dan atau Provinsi sangat dibutuhkan oleh guru dan sekolah demi terlaksananya implementasi Kurikulum Merdeka yang sukses dan berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara, para responden menyampaikan bahwa dukungan dari Kemendikbudristek

dan Dinas Provinsi DIY dirasakan masih kurang. Kurangnya dukungan ini ditunjukkan dengan minimnya sosialisasi/workshop/pelatihan dan pendampingan dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka yang diterima oleh sekolah dan guru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Waka Kurikulum sebagai berikut:

“Saya diundang sekali ke balai dikmen untuk sosialisasi, terus diceritani apa itu CP thet...thet... gitu. Terus dari dinas propinsi juga sekali dikasih sosialisasi eee.... saat itu cuman dikasih apa ya... materi tentang asesmen.”

Hal yang sama disampaikan oleh Kaproli TKRO:

“...sosialisasi dalam kontek jurusan masih kurang.”

Guru TKRO (H) menyampaikan:

“Ya namanya saja mandiri Pak... support dari dinas kurang sekali...”

Berdasarkan informasi-informasi di atas diketahui bahwa hanya Waka Kurikulum yang mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY, sementara untuk guru-guru TKRO belum pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait Kurikulum Merdeka. Hal ini sesuai dengan temuan Sunarni & Karyono (2023) dan Sari, Ahadin, Fauzi (2023) bahwa belum semua guru memperoleh kesempatan mengikuti sosialisasi Kurikulum Merdeka.

2. Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diterima oleh guru-guru di SMK N X mengakibatkan guru-guru kurang memahami Kurikulum Merdeka dengan baik. Kaproli TKRO menyatakan:

“terus terang saja, kaitannya yang sebenarnya kita inginkan itu kan pencerahan bedane opo (bedanya apa) untuk di level jurusan itu. Umpamanya kurikulum merdeka itu bedanya apa dengan kurtilas (Kurikulum 2013) sebetulnya konteksnya itu... filosofisnya itu apa yang berbeda. Kalau format mudah kita ikuti, tapi kalau filosofinya itu di jurusan terus terang belum pernah dijelaskan, belum kita pegang... sehingga kita menerjemahkan secara ‘liar’ saja. Nah kami di jurusan seringkali berkelakar itu, kalau ngobrol-ngobrol itu malah sering kali berkelakar, selama kelase bentuk’e isih padha, kotak, terus papan tulie’e isih neng ngarep, muride madhep ngarep (selama bentuk kelasnya masih sama, kotak, terus papan tulisnya masih di depan, siswanya menghadap ke depan) ya sama saja, kurikulumnya mau dinamain apapun, mau kurikulum merdeka, setengah merdeka, akan sama saja. Jadi mungkin secara format...administrasi berubah tapi pelaksanaannya belum tentu.”

Sekolah melalui Waka Kurikulum bersama-sama dengan Forum Waka Kurikulum SMK se-DIY secara mandiri sudah berusaha untuk menyelenggarakan workshop Kurikulum Merdeka. Namun demikian hasilnya belum sesuai yang diharapkan karena Nara Sumber yang dihadirkan ternyata juga kurang menguasai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Waka Kurikulum sebagai berikut:

“kemarin kita yang dari WKS Kurikulum se-DIY itu kan membuat forum pak... terus yuk kita belajar sendiri... akhirnya kemarin kita ngundang nara sumber dari Jakarta”

Namun demikian ketika ditanya apakah dari kegiatan tersebut berhasil mendapatkan filosofi Kurikulum Merdeka sebagaimana yang dikeluhkan oleh Kaproli TKRO, Waka Kurikulum menjawab:

“Nggak e Pak hahahah... bahkan saat itu ketika kita tanya tentang.. kan kita lihat struktur dan lain sebagainya, terus PKL-nya itu bagaimana? Thek..thek... gitu Ya terus (dijawab oleh nara sumber) ya besok saya bawa diskusi ke jakarta.”

Lebih lanjut Waka Kurikulum menjelaskan:

“Eee... gini Pak, sekarang memang dari info yang saya terima, saiki ki kuwi ra ono koyo kurikulum 13 mbiyen (sekarang ini tidak ada seperti K-13 dulu), K-13 itu kan ada dari PusKur, kemudian ada IN, instruktur nasional... instruktur nasional nanti ke propinsi... propinsi nanti ke... dan kayak menyebarkannya itu diatur cetho (jelas).. ini kan judul silakan belajar sendiri hahaha..”

Guru TKRO (S) menyatakan:

“sinau dewe (belajar sendiri)... ning iso opo ra isone ora ngerti (tetapi bisa atau tidaknya kita tidak tahu) haha...”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan-informan tersebut diketahui bahwa para guru masih kurang memahami filosofi dan konsep dari Kurikulum Merdeka. Hal ini mendukung hasil penelitian Syarifudin (2023) yang menemukan bahwa dari 60 orang guru yang berasal dari lima (5) Madrasah di Manggarai Barat hanya 25% guru yang memahami kurikulum merdeka dengan sangat baik, 35% lainnya pemahamannya dalam kategori cukup, 25% sedikit memahami, serta 15% kurang memahami kurikulum merdeka.

3. Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu tuntutan dan karakteristik dari Kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran disesuaikan dengan tahap capaian melalui pemberian materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar setiap siswa mencapai kompetensi yang diharapkan (Kemendikbudristek, 2022). Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Kaproli dan Guru TKRO di SMK N X. Kaproli TKRO menyatakan:

“tuntutan kurikulum merdeka itu kan mengakomodir perbedaan... Terus.... Konsep pembagian kelas kita kan masih cara lama, 1 kelas 36 siswa, gurunya 1, terus dengan kurikulum-13 saja itu guru praktik mengampu 36 siswa saja itu sudah minta ampun apalagi kita dituntut untuk mengakomodir perbedaan gitu lho Pak... itu susah sekali... belum paralelnya Pak, kadang-kadang di satu jurusan paralelnya lebih dari 2 atau 3 gitu kan... sementara gurunya hanya 8, ya bagaimana kita bisa mengakomodir perbedaan minat, bakat itu kalau murid kita banyak... seperti itu pak... jadi kadang kita itu ya akhirnya kembali lagi... mungkin format berubah... secara format administrasi berubah tapi...”

Guru TKRO (H) menyahut:

“carane mulang padha (caranya mengajar sama)”

Informasi dari Kaproli dan Guru TKRO tersebut di atas menegaskan bahwa mereka kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Secara administratif atau dokumen seperti Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, Jurnal/Agenda Guru mungkin berubah disesuaikan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka sebagaimana yang mereka pahami, namun demikian dalam pelaksanaan pembelajarannya masih sama sebagaimana pembelajaran-pembelajaran sebelumnya.

Kemendikbudristek (2022) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan melalui proses pemaknaan oleh satuan pendidikan dan pendidik. Mengutip Spillane et al. (Kemendikbudristek, 2022) menyatakan bahwa pemaknaan terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh representasi pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dalam membantu dalam proses interpretasi dan memfasilitasi proses pemahaman kebijakan tersebut. Termasuk dalam representasi tersebut adalah pelatihan dan peran pemerintah daerah dalam mendampingi proses implementasi kebijakan. Terkait dengan Kurikulum Merdeka, kurangnya representasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DIY dapat menyebabkan miskonsepsi guru terkait konten dan pedagogi yang menghambat implementasi kurikulum di dalam kelas (Palestina, Pangan, dan Ancho, 2020) dan pada akhirnya kebijakan perubahan kurikulum tersebut akan diacuhkan atau terlihat berubah tetapi pada kenyataannya masih melakukan praktik yang sama (Kemendikbudristek, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh guru Program Keahlian TKRO di SMK Negeri X sebagai Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Kategori Mandiri Berubah adalah: 1) Kurangnya Dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Provinsi DIY, 2) Kurangnya Pemahaman terhadap Konsep dan Filosofi Kurikulum Merdeka, dan 3) Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta melalui DIPA BLU skema Research Group Tahun 2023 yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Inayatul. (2023). *EFL Teachers' Challenges in Implementing the Independent Curriculum: A Case Study at SMA Negeri 8 Malang*. Skripsi. University of Islam Malang.
- Arifiani, I. K., Umami, N. (2023). Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8 August 2023, hal. 872-878. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.767>
- Hoftijzer, M., Levin, V., Santos, I., & Weber, M. (2020). TVET in the Times of COVID-19: Challenges and Opportunities. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/930861589486276271/pdf/TVET-Systems-response-to-COVID-19-Challenges-and-Opportunities.pdf>
- ILO. (2021). *Skills Development in the Time of COVID-19: Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training*. Geneva: International Labour Organization.
- Kemdikbudristek. (2022). Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek telah menerbitkan Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023.
- Molato-Gayares, Rhea et al. (2022). How to Recover Learning Losses from COVID-19 School Closures in Asia and the Pacific. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/BRF220301-2>
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). Hambatan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di MTS Raudlatul Uluum Aek Nabara Labuhanbatu. *Journal on Education*, Vol. 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hal. 17308- 17313.
- Palestina, R. L., Pangan, A. D., & Ancho, I. V. (2020). Curriculum implementation facilitating and hindering factors: The Philippines context. *International Journal of Education*, 13(2), 91-92. doi: 10.17509/ije.v13i2.25340
- Priestley, M. (2010). Schools, teachers, and curriculum change: A balancing act? *Journal of Educational Change*, 12(1), 1–23. doi:10.1007/s10833-010-9140-z
- Putri, Nurul Insani., Sabrina, Syania Icha., Budiman, Nanang., Utami, Wulan Tri Puji. 2023. Hambatan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Proses Pembelajaran di SD Negeri 3 Brosot. *Indonesian Journal of Elementary Education* Vol. 5, No.1, Juli 2023, hal. 51-60.
- Sari, A D P., Ahadin, Fauzi. (2023). Kendala Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di SD Negeri Unggul Lampeuneurut Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Elementary Education Research*, Vol.8 , No 2, Mei, 2023, hal. 60-68.
- Syarifudin. (2023). Analisis Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar, Studi Kasus 5 Madrasah Ibtidaiyah (MIN & MIS) Manggarai Barat. *Jurnal Edunet*, Vol. 1, No. 1, 2023, hal 32-42.
- Sitoningrum, Niken Dwi. (2023). Kurikulum Merdeka Belajar: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, hingga Keunggulannya. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d->

[6823183/kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-karakteristik-hingga-keunggulannya](https://doi.org/10.24060/6823183/kurikulum-merdeka-belajar-pengertian-tujuan-karakteristik-hingga-keunggulannya) pada tanggal 10 November 2023.

- Spink, J., Cloney, D., Berry, A. (2022). Studi Kesenjangan Pembelajaran 1 – Tak Sekedar Huruf dan Angka_Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Kemampuan Literasi dan Numerasi Dasar Siswa di Indonesia. Jakarta: INOVASI.
- Sunarni, Dan Karyono, Hari. (2023). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *Journal On Education*, Vol. 05, No. 02, Januari-Februari 2023, Hal. 1613-1620.
- Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023
- Tanggung, Femberianus Sunario. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Guru Sekolah Dasar Di Wilayah Pedesaan Pulau Sumba. *HINEF : JURNAL RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2023 hal. 23-29.
- UNESCO. (2020). Don't remediate, accelerate! Effective catch-up learning strategies: Evidence from the United States. Access: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374029>
- Warsihna, J., Ramdani, Z., Amri, A., Kembara, M. D., Steviano, I., Anas, Z., Anggraena, Y. (2023). Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD: Sebuah Temuan Multi-Perspektif. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 11, No. 01, Juli 2023, hal. 296-311. DOI: <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p296--311>
- Windayanti, Afmanda, Mihrab., Agustina, Ria., Kase, Emanuel B S., Safar, Muh., Mokodenseho, Sabil. (2023). Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka. *Journal on Education*, Vol. 06, No. 01, September-Desember 2023, hal. 2056-2063.
- Yuhastina, Y., Parahita, B. N., Astutik, D., Ghufonudin, G., & Purwanto, D. (2020). Sociology Teachers' Opportunities and Challenges in Facing "Merdeka Belajar" Curriculum in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). *Society*, 8(2), 732-753. doi: 10.33019/society.v8i2.234
- Zulaiha, Siti., Meisin, Meisin., Meldina, Tika. (2022). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol 9 No 2; hal. 163-177. doi:10.3390/su12104306.